

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014



**JALAN JENDERAL AHMAD YANI KM 32,5
BANJARBARU 70712**



BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : LK- 126 /PW16/1/2015
TANGGAL : 23 APRIL 2015

JALAN JENDERAL A.YANI KM 32,5
BANJARBARU 70712

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sesuai PP No 8 Tahun 2006 Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan laporan keuangan *Audited* selambat-lambatnya 1 minggu setelah hasil pemeriksaan BPK RI diterbitkan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Banjarbaru, 23 April 2015

Kepala Perwakilan,

Eddy Karim

NIP 19560412 197801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca (Audited)	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	16
B.2. Belanja Negara	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
C.1. Aset Lancar	21
C.2. Aset Tetap	22
C.3. Aset Lainnya	26
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	27
C.5. Ekuitas Dana Lancar	29
C.6. Ekuitas Dana Investasi	30
D. Pengungkapan Penting Lainnya	31
D.1. Informasi Biaya Penugasan	31
D.2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	15
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBK TA 2014 dan 2013	16
Tabel 6 : Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014	17
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014	17
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	18
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013	19
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013	19
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	20
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	21
Tabel 13 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013	21
Tabel 14 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013	22
Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014	25
Tabel 16 : Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013	27
Tabel 17 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013	28
Tabel 18 : Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	29

DAFTAR LAMPIRAN

- I. LAPORAN KEUANGAN POKOK
 - 1. Neraca Percobaan
 - 2. Neraca SAKPA 2014 (Audited)
 - 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4. LRA Belanja
 - 5. LRA Pengembalian Belanja
 - 6. LRA Pendapatan Negara dan Hibah
- II. LAPORAN SIMAK BMN
 - 1. Laporan Barang Pengguna
 - 2. Neraca Simak BMN (Audited)
 - 3. BAR Persediaan
 - 4. Rincian Koreksi Penyusutan per 30 Juni 2014
 - 5. Penghapusan Barang Milik Negara
- III. BA KAS DAN REKENING KORAN PER 31 DESEMBER 2014
- IV. DAFTAR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL TAHUN 2014
- V. MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI



PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 (*Audited*) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banjarbaru, 23 April 2015

Kepala Perwakilan,



Edy Karim

NIP 19560412 197801 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.163.200,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp20.549.879.823,00 atau mencapai 97,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.171.336.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2013

Uraian	Tahun 2014			Tahun 2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara	-	50.163.200	-	17.448.582
Jumlah Pendapatan	-	50.163.200	-	17.448.582
Belanja Negara (RM)	21.171.336.000	20.569.943.035	97,16	14.448.284.959
Pengembalian Belanja	-	20.063.212	-	35.631.182
Jumlah Belanja	21.171.336.000	20.549.879.823	97,06	14.412.653.777

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.430.288.121,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp225.187.472,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp31.205.100.649,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar nihil.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp32.199.119,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp31.398.089.002,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp192.988.353,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp31.205.100.649,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan / (Penurunan)	
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	225.187.472	134.983.327	90.204.145	66,82
Aset Tetap	31.205.100.649	30.141.155.050	1.063.945.599	3,41
Aset Lainnya	0	2.089.406	(2.089.406)	(100,00)
Jumlah Aset	31.430.288.121	30.278.227.783	1.153.886.338	3,67
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	32.199.119	63.290.551	(31.091.432)	(49,12)
Jumlah Kewajiban	31.199.119	63.290.551	(31.091.432)	(49,12)

Ekuitas				
Ekuitas Dana Lancar	192.988.353	71.692.776	121.295.577	169,18
Ekuitas Dana Investasi	31.205.100.649	30.143.244.456	1.063.945.599	3,41
Jumlah Ekuitas Dana	31.398.089.002	30.214.937.232	1.183.151.770	3,77
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	31.430.288.121	30.278.227.783	1.152.060.338	3,80

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	CATATAN	TA 2014			TA 2013 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
B	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B				
B.1	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	50.163.200	-	17.448.582
	Jumlah Pendapatan		-	50.163.200	-	17.448.582
B.2	BELANJA NEGARA	B.2				
	Rupiah Murni		21.171.336.000	20.549.879.823	97,06	14.412.653.777
	■ Belanja Pegawai	B.2.1	14.412.221.000	13.953.649.655	96,82	6.889.962.055
	■ Belanja Barang	B.2.2	6.548.675.000	6.392.616.818	97,62	6.978.550.222
	■ Belanja Modal	B.2.3	210.440.000	203.613.350	96,76	544.141.500
	Jumlah		21.171.336.000	20.549.879.823	97,06	14.412.653.777

II. N E R A C A (AUDITED)

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2014	31 DES 2013
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
■ Persediaan	C.1.1	225.187.472	134.983.327
JUMLAH ASET LANCAR		225.187.472	134.983.327
ASET TETAP	C.2		
■ Tanah	C.2.1	19.286.931.174	19.286.931.174
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.238.031.885	3.853.867.035
■ Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.348.275.915	13.348.275.915
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	512.583.113	512.583.113
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(6.180.721.438)	(6.860.502.187)
JUMLAH ASET TETAP		31.205.100.649	30.141.155.050
ASET LAINNYA	C.3		
■ Aset Lain-lain	C.3.1	13.900.000	523.882.414
■ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(13.900.000)	(521.793.008)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	2.089.406
JUMLAH ASET		31.430.288.121	30.278.227.783

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2014	31 DES 2013
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	23.911.119	39.536.551
■ Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	8.288.000	23.754.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		32.199.119	63.290.551
JUMLAH KEWAJIBAN		32.199.119	63.290.551
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.5		
■ Cadangan Persediaan	C.5.1	225.187.472	134.983.327
■ Dana Yang Harus Disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek	C.5.2	(23.911.119)	(39.536.551)
■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	C.5.3	(8.288.000)	(23.754.000)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		192.988.353	71.692.776
EKUITAS DANA INVESTASI	C.6		
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.6.1	31.205.100.649	30.141.155.050
■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.6.2	0	2.089.406

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		31.205.100.649	30.141.155.050
JUMLAH EKUITAS DANA		31.398.089.002	30.214.937.232
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		31.430.288.121	30.278.227.783

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Profil dan Kebijakan Teknis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas intern pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian intern guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mewujudkan tujuan akhir (*goals*) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai **“Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”**.

Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam empat rumusan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.

Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan posisi 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

▪ Kepala Perwakilan	:	Edy Karim, Ak.
▪ Kepala Bagian Tata Usaha	:	Subroto, Ak. MM
▪ Kepala Bidang IPP	:	Beligan Sembiring, SE. MM
▪ Kepala Bidang APD	:	Devi Elvino, Ak
▪ Kepala Bidang AN	:	Saryanto, Ak. MM
▪ Kepala Bidang Investigasi	:	Mukhamad Hasan Riyadi, SE
▪ Kepala Subbag Prolap	:	Ali Muchtar, S.Kom, M. Ec. Dev
▪ Kepala Subbag Kepegawaian	:	Noor Idahlia, SE
▪ Kepala Subbag Keuangan	:	M. Jalu Wredo Aribowo, Ak. M. Ec. Dev
▪ Kepala Subbag Umum	:	Evendy Sinaga

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban*

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan

kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap*

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp50.163.200,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp50.163.200,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2014.

Realisasi PNBP Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp32.714.618,00 atau 187,49 persen dibandingkan realisasi PNBP TA 2013 sebesar Rp17.448.582,00. Tingginya kenaikan tersebut di sebabkan adanya hasil penjualan/lelang aset sebesar Rp31.400.000,00 sesuai dengan Nomor : RL429/2014 tanggal 15 September 2014 dan Pejabat lelang Didik Priyo Utomo.

Rincian Penjualan/lelang Aset sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penjualan/lelang Mini Bus (Toyota Kijang)	17.000.000,00
2.	Penjualan/lelang Bus	11.798.000,00
3.	Penjualan/lelang Peralatan Kotor	2.602.000,00
	Jumlah	31.400.000,00

Perbandingan realisasi PNBP Tahun 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBP Tahun 2014 dan 2013

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP		Naik / (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
1. Pendapatan Pengelolaan BMN	47.463.200,00	16.845.540,00	30.617.660,00	181,75
2. Pendapatan Lain-Lain	2.700.000,00	603.042,00	2.096.958,00	347,73
Jumlah	50.163.200,00	17.448.582,00	32.714.618,00	187,49

Realisasi Belanja
Negara
Rp20.549.879.823,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp20.549.879.923,00 atau 97,06 persen dari anggaran sebesar Rp21.171.336.000,00.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 menurut program dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014

Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Program DukunganManajemendanPelaksanaan TugasTeknisLainnyaBPKP	16.805.834.000	16.268.947.924	96,89
02	Program PeningkatanSaranadanPrasarana Aparatur-BPKP	189.000.000	182.211.000	96,41
06	Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara danPembinaanPenyelenggaraan SPIP	4.021.910.000	3.960.622.099	98,62
Jumlah		21.171.336.000	20.549.879.823	97,06

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

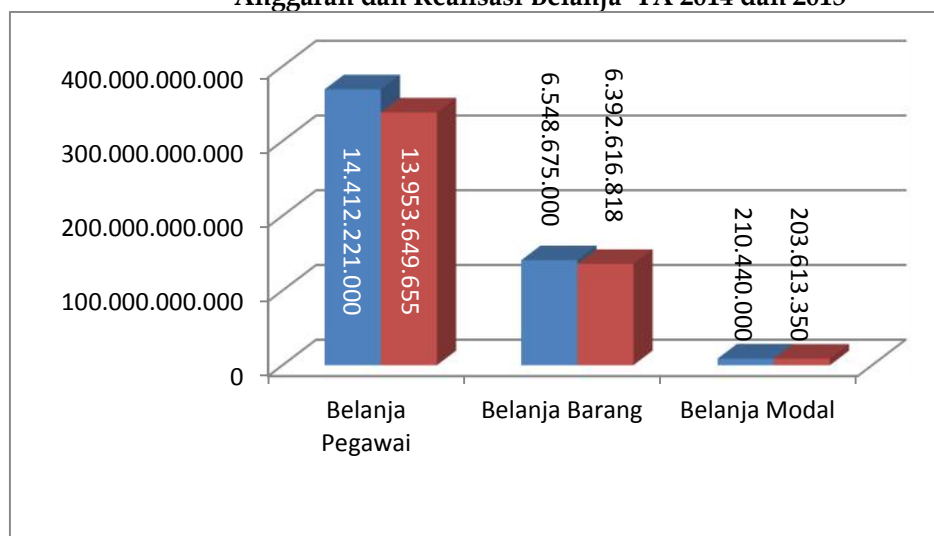
Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	14.412.221.000	13.953.649.655	96,82
52	Belanja Barang	6.548.675.000	6.392.616.818	97,62
53	Belanja Modal	210.440.000	203.613.350	96,76
Jumlah		21.171.336.000	20.549.879.823	97,06

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut ini:

Grafik 1

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013



Realisasi belanja Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp5.061.198.823,00 atau 32,67 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2013 disebabkan antara lain pembayaran Tunjangan Kinerja dilimpahkan pada unit kerja masing-masing satker. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
51	Belanja Pegawai	13.953.649.655	6.889.962.055	7.063.687.600	102,52
52	Belanja Barang	6.392.616.818	6.978.550.222	(585.933.404)	(8,39)
53	Belanja Modal	203.613.350	544.141.500	(340.528.150)	(62,58)
	Jumlah	20.549.879.823	14.412.653.777	6.137.226.046	42,58

Belanja Pegawai
Rp13.953.649.655,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp13.953.649.655,00 dan Rp6.889.962.055,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp7.063.687.600,00 atau 102,52 persen antara lain disebabkan pembayaran Tunjangan Kinerja dilimpahkan pada unit kerja masing-masing satker. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.267.652.443	6.779.275.837	488.376.606	(7,20)
Belanja Lembur	124.045.000	132.011.000	(7.966.000)	(6,03)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	6.576.098.424	0	6.576.098.424	100
Realisasi Belanja Bruto	13.967.795.867	6.911.286.837	7.056.509.030	102,10
Pengembalian Belanja	(14.146.212)	(21.324.782)	7.178.570	(33,66)
Realisasi Belanja Netto	13.953.649.655	6.889.962.055	7.063.687.600	102,52

Belanja Barang
Rp6.392.616.818

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp6.392.616.818,00 dan Rp6.978.550.222,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp585.933.404,00 atau (8,39) persen antara lain disebabkan pemotongan anggaran yang terkait dengan belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang disajikan dalam Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Rp	%
Belanja Barang Operasional	778.241.546	830.488.800	(52.247.000)	(6,29)
Belanja Barang Non Operasional	396.498.588	469.294.316	(72.795.728)	(15,51)
Belanja Jasa	303.593.296	326.021.503	23.223.901	13,88
Belanja Pemeliharaan	477.848.427	400.927.653	76.920.774	19,18
Belanja Perjalanan Dlm Negeri	4.442.351.961	4.966.124.350	(523.772.389)	(10,54)
Realisasi Belanja Bruto	6.398.533.818	6.992.856.622	(594.322.804)	(8,49)
Pengembalian Belanja	(5.917.000)	(14.306.400)	8.389.400	(0,59)
Realisasi Belanja Netto	6.392.616.818	6.978.550.222	(585.933.404)	(8,39)

Belanja Modal
Rp203.613.350,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp203.613.350,00,00 dan Rp298.342.500,00. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp94.729.150,00,00 atau 31,75 persen antara lain tidak adanya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014 dibandingkan dengan TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
	TA 2014 (Rp)	TA 2013(Rp)	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.211.000,00	278.492.500,00	(96.281.500,00)	(34,57)
BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	21.402.350,00	14.752.500,00	6.649.850,00	45,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	249.434.000,00	(249.434.000,00)	-
Realisasi Belanja Bruto	203.613.350,00	544.141.500,00	(304.528.150,00)	(62,58)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	203.613.350,00	544.141.500,00	(340.528.150,00)	(62,58)

Aset Lancar
Rp225.187.472,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp225.187.472,00 dan Rp134.983.327,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Aset Lancar	31 Desember 2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Persediaan	225.187.472,00	134.983.327,00
	Jumlah	225.187.472,00	134.983.327,00

Persediaan
Rp225.187.472,00

C.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp225.187.472,00 dan Rp134.983.327,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	2013 (Rp)
1	Barang Konsumsi	185.483.679,00	105.764.104,00
2	Barang Untuk Pemeliharaan	14.104.810,00	9.473.700,00
3	Suku Cadang	0,00	316.016,00
4	Bahan Baku	12.400.000,00	8.800.000,00
5	Persediaan Lainnya	13.198.983,00	10.629.507,00
	Jumlah	225.187.472,00	134.983.327,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp31.205.100.649,00

C.2 Aset Tetap

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp31.205.100.649,00 dan Rp30.141.155.050,00 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Tanah	19.286.931.174,00	19.286.931.174,00
2	Peralatan dan Mesin	4.238.031.885,00	3.853.867.035,00
3	Gedung dan Bangunan	13.348.275.915,00	13.348.275.915,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	512.583.113,00	512.583.113,00
5	Akumulasi Penyusutan	(6.180.721.438,00)	(6.860.502.187,00)
	Nilai Buku	31.205.100.649,00	30.141.155.050,00

Tanah
Rp19.286.931.174,00 (nilai perolehan).

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp19.286.931.174,00 dan Rp19.286.931.174,00. Di Tahun 2014 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai perolehan.

Tanah tersebut terdiri dari 14 (empat belas) buah sertifikat hak milik seluas 30.010 M2, dengan rincian sebagai berikut:

No.	KIB	Tanggal Perolehan	Nomor Sertifikat Hak Pakai	LUAS M2	NILAI (Rp)
1.	1	20/12/1969	243	250	183.015.000,00
2.	2	25/06/1996	20	232	157.760.000,00
3.	3	25/06/1996	21	354	240.720.000,00
4.	4	25/06/1996	13	530	530.000.000,00
5.	5	15/07/1974	03	2.247	3.370.500.000,00
6.	6	07/01/1980	50	400	228.000.000,00
7.	7	19/06/1997	14	1.072	589.600.000,00

8.	8	30/12/1988	24	900	189.900.000,00
9.	9	30/12/1988	22	1.626	343.086.000,00
10.	10	30/12/1988	23	1.848	462.000.000,00
11.	11	01/08/2007	01,02,03	8.771	877.100.000,00
12.	1	23/07/1986	53	1.800	4.590.000.000,00
13.	2	10/03/1998	101	500	1.275.000.000,00
14.	3	17/05/2006	45	9.480	6.250.250.174,00
JUMLAH				30.010	19.286.931.174,00

Peralatan dan
Mesin
Rp4.238.031.885.
(nilai perolehan)

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp4.238.031.885,00 dan Rp3.853.867.035,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp3.623.162.590,00, menjadi sebesar Rp614.869.295,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 2013	Rp 3.853.867.035,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	Rp 203.613.350,00
- Transfer Masuk	Rp 180.551.500,00
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2014	Rp 4.238.031.885,00
Akumulasi Penyusutan Sm I 2014	Rp (3.507.902.321,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2014	Rp (5.973.062,00)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp (3.623.162.590,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp 614.869.295,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa:

- Pembelian Meubelair sebesar Rp62.585.000,00 dan Alat Pengolah Data sebesar Rp141.028.350,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2014 sebesar Rp203.613.350,00.
- Transfer masuk peralatan dan mesin dari Biro Umum BPKP Pusat berupa 1 (satu) unit mobil penumpang/Mini Bus sebesar Rp180.551.500,00 sesuai dengan BAST Nomor: BA-80/SU05/3/2014.
- Akumulasi Penyusutan Semester I 2014 sebesar minus Rp3.507.902.321,00.
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Semester I 2014 sebesar minus Rp5.973.062,00.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.13.348.275.915
(nilai perolehan).*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp13.348.275.915,00 dan Rp13.348.275.915,00

Tidak terdapat perubahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2014. Saldo tersebut terdiri atas 12 unit bangunan gedung tempat kerja senilai Rp10.785.911.737,00 dan 36 unit bangunan gedung tempat tinggal senilai Rp2.562.364.178,00

Sedangkan nilai buku pada Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.163.095.461,00 menjadi sebesar Rp11.185.180.454,00,00 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 2013	Rp	13.348.275.915,00
Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	13.348.275.915,00
Akumulasi Penyusutan Sm I 2014	Rp	(3.272.853.179,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2014	Rp	(1.283.819.613,00)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des2014	Rp	(2.163.095.461,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	11.185.180.454,00

Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dan terdapat koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar minus Rp1.283.819.613,00.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp512.583.113
(nilai perolehan).*

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp512.583.113,00 dan Rp512.583.113,00 Tidak terdapat perubahan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo tersebut terdiri atas Jalan sebesar Rp410.296.153,00 dan Instalasi Jaringan Listrik sebesar Rp102.286.960,00

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp376.124.429,00 dan Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp18.338.958,00

Sedangkan nilai buku pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp118.119.726,00 Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp	512.583.113,00
Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		0,00
Saldo per 31 Desember 2014	Rp	512.583.113,00
Akumulasi Penyusutan Sm I 2014	Rp	(378.795.988,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2014	Rp	(6.231.987,00)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	Rp	(394.463.387,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp	118.119.726,00

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(6.180.721.438,00)

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar minus Rp6.180.721.438,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 15, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Barang Pengguna.

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.238.031.885,00	(3.623.162.590,00)	614.869.295,00
2	Gedung dan Bangunan	13.348.275.915,00	(2.163.095.461,00)	11.185.180.454,00
3	Jalan dan Jembata	410.296.153,00	(376.124.429,00)	34.171.724,00
4	Jaringan	102.286.960,00	(18.338.958,00)	83.948.002,00
Jumlah		18.098.890.913,00	(6.180.721.438,00)	11.918.169.475,00

Kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Kedua ketentuan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan adanya koreksi (tambah/kurang) nilai akumulasi penyusutan per 30 Juni 2014 sebesar Rp8.455.576.150,00, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2014

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2014	Koreksi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2014 (Stl Ko)
			Pertama Kali	Tahun 2013	Smt I Thn 2014	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3+7
1.	Peralatan dan Mesin	3.507.902.321	51	(5.122.140)	(850.973)	(5.973.062)	3.501.929.259
2.	Gedung dan Bangunan	3.272.853.179	(1.404.536.573)	80.477.977	40.238.983	(1.283.819.613)	1.989.033.566
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	378.795.988	(6.549.961)	211.982	105.992	(6.231.987)	372.564.001
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
Jumlah		7.159.551.488	(1.411.086.483)	75.567.819	39.494.002	(1.296.024.662)	5.863.526.826

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II - 4

Aset Lainnya
Rp0,00

C.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Nihil dan Rp2.089.406,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Aset Lain-Lain	13.900.000,00	523.882.414,00
2	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(13.900.000,00)	(521.793.008,00)
Nilai Buku		0	2.089.406

Aset Lain-Lain
Rp13.900.000,00

C.3.1 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp13.900.000,00 dan Rp523.882.414,00.

Jumlah tersebut merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp13.900.000,00 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai
1.	Sepeda Motor	Unit	1	13.900.000,00	13.900.000,00
Total					13.900.000,00

Mutasi Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 2013	Rp 523.882.414,00
Mutasi Tambah:	0
Mutasi Kurang:	Rp (509.982.414,00)
Saldo per 31 Desember 2014	Rp 13.900.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp 13.900.000,00

Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp509.982.414,00 sesuai dengan Surat Sekretariat Utama Nomor KEP-922/K.SU/05/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dan Surat usulan penghapusan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-2498/PW16/1/2014 tanggal 14 Oktober 2014 daftar rincian Aset lain-lain yang dihapuskan tersaji pada lampiran II - 5

Amortisasi Aset Lainnya
(Rp13.900.000,00)

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing minus sebesar Rp13.900.000,00 dan Rp521.793.008,00

Mutasi Aset Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	Rp (521.793.008,00)
Mutasi Tambah:	0
Mutasi Kurang:	Rp 507.893.008,00
Saldo per 31 Desember 2014	Rp (13.900.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2014	Rp (13.900.000,00)

Saldo tersebut diatas, sebesar Rp13.900.000,00 yang dalam kondisi rusak berat, dan akan diusulkan untuk dihapuskan dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai
1.	Sepeda Motor	Unit	1	13.900.000,00	13.900.000,00
Total					13.900.000,00

Penghapusan saldo tersebut dari Neraca didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kusa Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMN, dan Neraca.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp32.199.119,00

C. 4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp32.199.119,00 dan Rp63.290.551,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	23.911.119,00	39.536.551
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	8.288.000,00	23.754.000
	Jumlah	32.199.119,00	63.290.551

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp23.911.119,00

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp23.911.119,00 dan Rp39.536.551,00

Jumlah tersebut merupakan belanja yang masih dibayar per tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
▪ Tagihan Listrik Bulan Desember 2014	21.029.437,00
▪ Tagihan Air Bulan Desember 2014	1.493.480,00
▪ Tagihan Telepon Bulan Desember 2014	1.388.202,00
Jumlah	23.911.119,00

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp8.288.000,00

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp8.288.000,00 dan Rp23.754.000,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

No	Obyek Sewa	Jangka Waktu (Periode)	Nilai Sewa (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 (Rp)
1	Tanah ATM BRI	3 tahun (Juli 2012 s.d.Juni 2015)	46.200.000,00	7.700.000,00
2	Sewa Rumdin	Bulan Januari s.d Maret 2015	0,00	588.000,00
Jumlah				8.288.000,00

Ekuitas Dana
Lancar
Rp192.988.353,00

C.5 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan dari beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek.

Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam Tabel 18 di bawah ini:

Tabel 18
Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Cadangan Persediaan	225.187.472,00	134.983.327,00
2.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(23.911.119,00)	(39.536.551,00)
3.	Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(8.288.000,00)	(23.754.000,00)
	Jumlah	192.988.353,00	71.692.776,00

*Cadangan
Persediaan
Rp225.187.472,00*

C.5.1 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp225.187.472,00 dan Rp134.983.32.007,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk persediaan.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran
Utang Jangka
Pendek
(Rp23.911.119,00)*

C.5.2 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar minus Rp23.911.119,00 dan minus Rp39.536.551,00 . Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Barang/Jasa yang
Masih Harus
Diserahkan
(Rp8.288.000,00)*

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar minus Rp8.288.000,00 dan minus Rp23.754.000,00 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

*Ekuitas Dana
Investasi*

C.6 Ekuitas Dana Investasi

*Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp31.206.926.649,
00*

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp31.205.100.649,00 dan Rp30.141.155.050,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

*Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya Rp0*

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil dan Rp2.089.406,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**D.1 Informasi Biaya Penugasan**

Selama Tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, juga didanai dari biaya penugasan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 jumlah penugasan yang dibiayai dari mitra kerja sebanyak 165 PP dan telah menghasilkan 166 LHP, dan realisasi biaya penugasan tersebut sebesar Rp1.947.484.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
IPP	75	75	636.206.200,00
APD	25	26	306.860.400,00
Akuntan Negara	65	65	1.004.417.500,00
Investigasi	0	0	0
Jumlah	165	166	1.947.484.100,00

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

D.2 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran V.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**D.1 Informasi Biaya Penugasan**

Selama Tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, juga didanai dari biaya penugasan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 jumlah penugasan yang dibiayai dari mitra kerja sebanyak 55 PP dan telah menghasilkan 166 LHP, dan realisasi biaya penugasan tersebut sebesar Rp1.947.484.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang	Jumlah Penugasan	Jumlah LHP	Jumlah Dana (Rp)
IPP	75	22	636.206.200,00
APD	25	26	306.860.400,00
Akuntan Negara	65	65	1.004.417.500,00
Investigasi	0	0	0
Jumlah	165	166	1.947.484.100,00

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

D.2 Informasi Revisi Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 sesuai Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-089.01.2.450602/2014 tanggal 05 Desember 2013 adalah sebesar Rp21.360.705.000,00 Anggaran tersebut direvisi dengan rincian sebagai berikut:

D.2.1 Revisi ke-01 (kewenangan Kanwil DJPB)

Revisi ke-01 DIPA dilaksanakan sesuai dengan surat usulan revisi dipa Nomor : S-326/PW16/1/2014 tanggal 4 Februari 2014 berupa :

1. Perbaikan pada kesalahan kode Wilayah/Lokasi dalam dipa dari kode 51 (Banjarmasin) ke 52 (Banjarbaru).
2. Penyesuaian kegiatan pengawasan dengan PKP2T Tahun 2014 yang mengakibatkan perubahan Sub Output namun tidak merubah total output dan pagu anggaran pada program 06.3701

Surat pengesahan revisi dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-109/WPB.19/BD.02/2014 tanggal 10 Februari 2014.

D.2.2 Revisi ke-02 (Kewenangan DJA)

Revisi ke-02 DIPA dilaksanakan sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor : S-210/SU.03/I/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Revisi Anggaran untuk Audit TPG dan Audit Klaim Jamkesmas. Pagu Anggaran menjadi sebesar Rp21.984.885.000,00 atau naik sebesar Rp624.180.000,00 dengan rincian per program sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran Awal (Rp)	Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
089.01.06 (3701.001)	3.978.784.000,00	624.180.000,00	4.602.964.000,00

Sedangkan rincian per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Barang	7.387.068.000,00	624.180.000,00	8.011.248.000,00

Surat Pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor:S-626/ AG/2014 tanggal 11 April 2014

D.2.3 Revisi ke-03 (Kewenangan Kanwil DJPB)

Revisi ke-03 dilaksanakan sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Nomor: S-1100/PW16/1/2014 tanggal 9 Mei 2014 berupa:

- ✓ Penyesuaian Akun Perjalanan Dinas MAK 524111, 524113 dan 524114.
- ✓ Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan

- ✓ Mempercepat pencapaian kinerja K/L
- ✓ Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
- ✓ Perubahan atau pergeseran rincian anggaran tidak merubah pagu dan output.

Surat Pengesahan Revisi dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-826/WPB.19/BD.02/2014 tanggal 16 Mei 2014.

D.2.4 Revisi ke-04 (Kewenangan DJA)

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 setelah revisi ke-03 sebesar Rp21.984.885.000,00

Sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor: S-862/SU/03/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Anggaran Tahun 2014 (self blocking). Alokasi penghematan/pemotongan (self blocking) anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp4.680.261.000, dengan rincian per program sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran Awal (Rp)	Self Blocking (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
089.01.01	16.277.749.000,00	1.949.730.000,00	16.277.749.000,00
089.01.06	5.528.136.000,00	2.730.531.000,00	5.528.136.000,00
Jumlah		4.680.261.000,00	

Sedangkan rincian per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Self Blocking (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	13.773.197.000,00	1.209.244.000,00	13.773.197.000,00
Belanja Barang	8.011.248.000,00	3.471.017.000,00	8.011.248.000,00
Jumlah		4.680.261.000,00	

Surat Pengesahan Revisi dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-981/AG/2014 tanggal 10 Juni 2014.

D.2.5 Revisi ke-05 (Kewenangan DJA)

Menunjuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja BPKP dalam APBN-P TA 2014 dan Surat

Sekretaris Utama Nomor: S-1049/SU/03/2014 Hal Usulan Revisi Anggaran APBN-P BPKP TA 2014. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Revisi ke-05 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran Awal (Rp)	Pemotongan Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
089.01.01	16.277.749.000,00	822.762.000,00	15.454.987.000,00
089.01.02	179.000.000,00	0,00	179.000.000,00
089.01.06	5.528.136.000,00	1.351.634.000,00	4.176.502.000,00
Jumlah	21.984.885.000,00	2.174.396.000,00	19.810.489.000,00

Sedangkan rincian per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Pemotongan Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	13.773.179.000,00	711.823.000,00	13.061.374.000,00
Belanja Barang	8.011.248.000,00	1.462.573.000,00	6.548.675.000,00
Belanja Modal	200.440.000,00	0,00	200.440.000,00
Jumlah	21.984.885.000,00	2.174.396.000,00	19.810.489.000,00

Surat Pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Nomor:

S-1093/AG/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengesahan Revisi Anggaran (APBN-P) Ke-05.

D.2.6 Revisi ke-06 (Kewenangan Kanwil DJPB)

Sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-2216/PW16/1/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Usulan Revisi Anggaran ke - 06, dan Surat Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-1433/WPB.19/BD.02/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Revisi Anggaran.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran untuk penyesuaian Akun Perjalanan Dinas pada kegiatan pengawasan, dan revisi tidak merubah pagu anggaran.

Tujuan revisi yaitu untukantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja K/L serta meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

D.2.7 Revisi ke-07 (Kewenangan DJA)

Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor: S-1897/SU/03/2014 tanggal 5 Desember 2014 hal Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2014.

Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran, adanya pergeseran rincian pada anggaran Belanja Pegawai serta penambahan PAGU Belanja Modal.

Tujuan revisi yaitu antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja K/L serta meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	14.412.221.000,00	0,00	14.412.221.000,00
Belanja Barang	6.548.675.000,00	0,00	6.548.675.000,00
Belanja Modal	200.440.000,00	10.000.000,00	210.440.000,00
Jumlah	21.161.336.000,00	10.000.000,00	21.171.336.000,00